

**ALUR PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
KEGIATAN *DOOR TO DOOR* DI KANTOR UNIT PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG**

RINGKASAN LAPORAN MAGANG



Disusun Oleh:

Farras Dwi Pratiwi

1118 30599

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

JUNI 2022

TUGAS AKHIR

ALUR PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KEGIATAN DOOR TO DOOR DI KANTOR UNIT PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Dipersiapkan dan disusun oleh:

FARRAS DWI PRATIWI

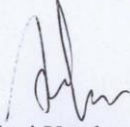
Nomor Induk Mahasiswa: 111830599

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 28 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

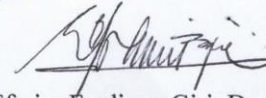
Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Fachmi Pachlevi Yandra, S.E., M.Sc.

Penguji



Efraim Ferdinan Giri, Dr., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 28 Juni 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari pajak provinsi yang telah memberikan kontribusi yang besar untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Masalah yang sering di hadapi adalah penunggakan pemabayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, Unit Pengelola Pendapatan Daerah melakukan kegiatan *door to door* pada Pajak Kendaraan Bermotor. Kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Pemalang berlokasi di Jalan Pemuda, NO.49, Mulyoharjo, Pemalang, Jawa Tengah. Penulis melaksanakan kegiatan magang berlangsung kurang lebih selama tiga bulan dimulai sejak 2 Maret 2022 s.d 28 Mei 2022 dengan menetapkan jam kerja yaitu Senin s.d Jumat. Selama kegiatan magang berlangsung penulis melakukan pekerjaan mencetak SPKPPKB, menginput atau merekam SPKPPKB, menjurnal SPKPPKB, mengarsip SPKPPKB, dan menjurnal tunggkan SPKPPKB. ada berbagai masalah yang ditemukan oleh penulis salah satunya yakni pada saat melakukan input atau rekam data nomor kendaraan bermotor yang tidak tercetak sehingga, membuat penulis melakukan input atau rekam data menjadi terhambat. Penulis senang karena bisa mendapatkan ilmu baru yang tidak diperoleh penulis selama berada di bangku perkuliah.

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Unit Pengelola Pendapatan Daerah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

Motor Vehicle Tax is one part of the provincial tax that makes a major contribution to the progress and prosperity of the community. The problem that is often faced is arrears in payment of Motor Vehicle Taxes. Therefore, the Regional Revenue Management Unit carries out door to door activities on Motor Vehicle Taxes. The Pemalang Regency UPPD Office is located at Pemuda street, NO. 49, Mulyoharjo, Pemalang, Central Java. The author carries out the internship for approximately three months starting from March 2, 2022, to May 28, 2022, by setting working hours, namely Monday to Friday. During the internship, the writer did the work of printing SPKPPKB, inputting or recording SPKPPKB, journalizing SPKPPKB, filing SPKPPKB, and journalizing in arrears of SPKPPKB. there are various problems found by the author, one of which is when inputting or recording motorized vehicle number data that is not printed so that the author makes input or data recording hampered. The author got a lot of new knowledge that the author gained did not get while in college.

Keywords: Motor Vehicle Tax, UPPD

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan berjalannya waktu hampir di seluruh negara mengakui bahwa pajak merupakan penghasilan utama dan terbesar di suatu negara. Pajak Daerah adalah kontribusi dari wajib pajak kepada daerah yang terutang bagi orang pribadi atau pun badan yang bersifat memaksa sesuai dengan aturan Undang –Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan yang bisa diperoleh secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pemerintah Daerah pajak daerah di bagi menjadi dua bagian yaitu ada pajak provinsi dan pajak kota/kabupaten. Pemerintah provinsi diberi kewenangan untuk dapat melakukan pemungutan pajak yang berjumlah enam belas. Diantara enam belas pajak tersebut ada lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kota/kabupaten. Pajak Kendaraan Bermotor(PKB), Pajak untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak untuk Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak untuk Air Permukaan, dan Pajak Rokok termasuk bagian dari pajak provinsi yang juga merupakan bagian dari pajak daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh daerah, baik untuk kendaraan roda dua, roda tiga dan roda empat keatas. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu sumber pendapatan daerah dan mejadi sumber yang diunggulkan kontribusinya untuk menambah pendatan daerah. Namun, tidak semua pendapatan asli Pajak Kendaraan Bermotor merupakan hak pemerintah provinsi. Sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku proporsi yang diberikan oleh pemerintah kota/kabupaten sebesar 30% dan untuk pemerintah provinsi sebesar 70%. Pajak Kendaraan Bermotor dipungut atas kepemilikan wajib pajak terhadap kendaran bermotor sekaligus menajadi objek pajak, dan subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan.

Meskipun Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu sumber yang diunggulkan kontribusinya, namun masih saja menemukan beberapa permasalahan dalam melakukan proses untuk membayar Pajak Kendaraan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Bermotor. Contoh salah satu permasalahannya adalah penunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor semakin meningkat. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor bakal muncul pada saat berakhirnya masa pajak kendaraan dan wajib pajak belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Usaha yang dapat dilakukan oleh Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) untuk menanggulangi masalah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor adalah melakukan kegiatan dengan optimalisasi pajak daerah lewat kegiatan seperti penagihan dan memberikan peringatan kepada wajib pajak dan menyampaikan surat ketetapan pajak daerah kepada wajib pajak. Kegiatan *door to door* ini adalah suatu kegiatan dalam menagih tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan mendatangi secara langsung ke tempat tinggal wajib pajak. *Door to door* lebih di peruntungkan untuk kendaraan bermotor yang sebelumnya belum pernah melakukan pendataan, hal dikecualikan untuk kendaraan bermotor masih berstatus dimiliki saat di data sebelumnya. Tunggakan pajak mengalami kenaikan di setiap tahunnya sehingga hal ini menjadi perhatian khusus Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD). Dengan adanya kegiatan pelayanan publik yang transparan, akuntabel serta efektif dan efisien akan menyelesaikan adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor, salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan kegiatan operasional *door to door*.

Tujuan

Ada dua tujuan dari kegiatan magang yaitu:

Tujuan Umum

1. Agar penulis bisa membandingkan ilmu yang didapat pada saat kuliah dengan keadaan kerja yang ada sebenarnya.
2. Mengetahui dan memahami penerapan teori-teori yang pernah diterima pada waktu kuliah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tujuan Khusus

1. Untuk dapat memperoleh pengetahuan tentang pengelolaan data penagihan pada Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Memperoleh pengetahuan yang berhubungan dengan PKB melalui pengalaman magang kerja di Unit Pengelola Pendapatan Daerah Pematang Jaya.
3. Mengetahui hambatan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan kegiatan *door to door*

Manfaat

Kegiatan pelaksanaan magang memberikan manfaat bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan magang yaitu:

Manfaat yang Diperoleh Mahasiswa

1. Mengaplikasikan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan untuk di terapkan dalam pelaksanaan magang
2. Meningkatkan kemampuan penulis dalam kreativitas dan keterampilan
3. Menambah wawasan akan adanya situasi dan kondisi serta bisa untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan dunia kerja.

Manfaat yang Diperoleh Perguruan Tinggi

1. Membina untuk adanya kerja sama antara perguruan tinggi dengan Unit Pengelola Pendapatan Daerah Pematang Jaya
2. Dapat di manfaatkan sebagai masukan dan evaluasi kurikulum yang ada diperguruan tinggi agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bagi perusahaan atau instansi pemerintah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Manfaat yang Diperoleh Instansi

1. Instansi terbantu dengan mendapatkan bantuan tenaga kerja
2. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidik di perguruan tinggi swasta, khususnya untuk STIE YKPN Yogyakarta.

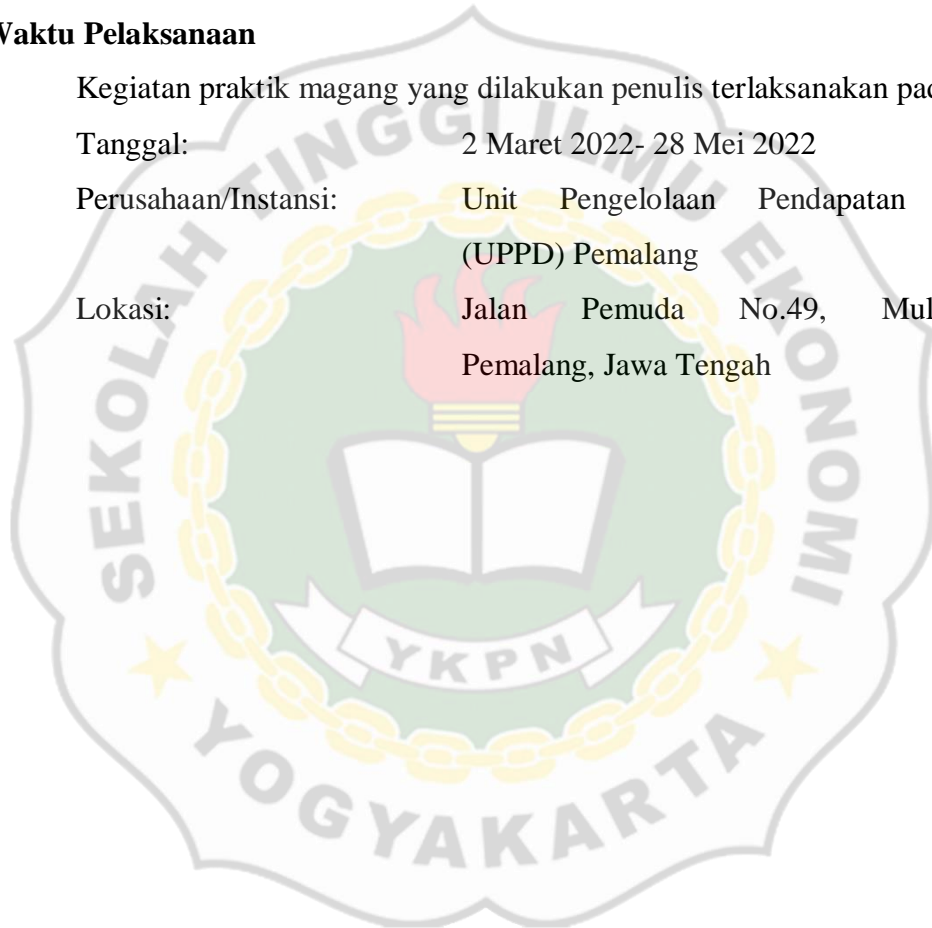
Waktu Pelaksanaan

Kegiatan praktik magang yang dilakukan penulis terlaksanakan pada:

Tanggal: 2 Maret 2022- 28 Mei 2022

Perusahaan/Instansi: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah
(UPPD) Pemalang

Lokasi: Jalan Pemuda No.49, Mulyoharjo,
Pemalang, Jawa Tengah



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

GAMBARAN UMUM

Sejarah

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Jawa Tengah Nomor HUK 923/2/18 tanggal 11 Oktober 1968 dibentuknya pertama kali dengan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi Jawa Tengah. Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi Jawa Tengah mulai ditata dengan tegas sesuai dengan fungsi dan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 2 tahun 1981.

Pada saat itu Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten/kota dan memiliki 42 unit. Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) sekarang sudah di ubah namanya menjadi Badan ini di kenal dengan nama Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD). Sedangkan Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) merupakan perpanjangan tangan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD). Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan salah satu bagian dari SAMSAT. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau lebih dikenal dengan sebutan SAMSAT merupakan gabungan dari Unit Pengelola Pendapatan Daerah, Kepolisian wilayah di Jawa Tengah dan PT Jasa Raharja.

Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) merupakan UPT (unit pelaksana teknis) yang dipimpin oleh Kepala Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) di Pemalang berlokasi di Jalan Pemuda No.49, Mulyoharjo, Pemalang, Jawa

Visi, Misi, dan Kebijakan Mutu

Visi

Manjadi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Transparan dan Akuntabel didukung oleh Pelayanan Prima dalam Mewujudkan Optimalisasi Pendapatan Daerah yang Berdaya Guna.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Misi

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mengembangkan implementasi Teknologi Informasi
3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan publik dan prosedur
4. Meningkatkan budaya aparatur dalam pelayanan publik
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah
7. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain

Kebijakan Mutu

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) berkomitmen dapat mewujudkan pelayanan prima dengan cara melakukan perbaikan pengelolaan pendapatan daerah secara berkesinambungan

Tugas Pokok dan Fungsi UPPD

UPPD Pemalang merupakan bagian dari 37 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Jawa Tengah yang di koordinatori oleh Unit Pengelolaan Pendaptan Daerah (UPPD) Pekalongan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur daerah Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 menjelaskan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah, tugas utama bagi UPPD yaitu mampu mewujudkan sebagian kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis yang dapat penunjang dibidang pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu UPPD mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan Pajak & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pendaptan lain-lain
2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan Pajak & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) dan pendaptan lain-lain, pembukuan pelaporan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan pendapatan daerah
4. Pengelolaan ketatausahaan
5. Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi BBNKB(Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

Lokasi Kantor

Lokasi Kantor: Jalan Pemuda No.49, Mulyoharjo, Pemalang, Jawa Tengah

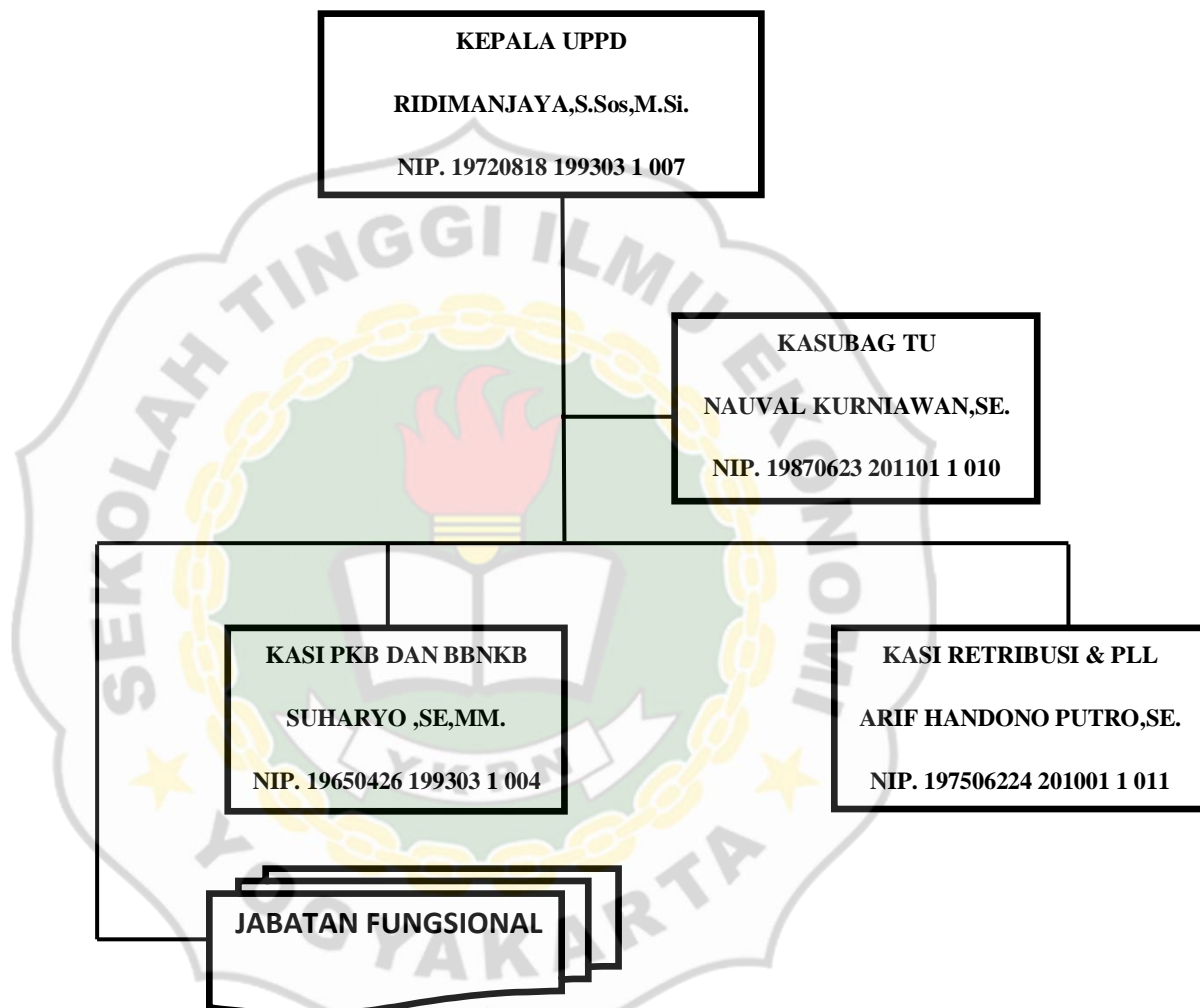
Telpon: (0284) 321137

E-mail: up3adpemalang@gmail.com



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.2 Struktur Oraganiasi



Sumber: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah

Job Deskripsi Bagian Intansi

A. Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD)

Tugas dari Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) yaitu:

1. Menyusun rencana teknis operasional Pajak Kendaraan Bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional Pajak Kendaraan Bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Mengevaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan
4. Pengelolaan ketatausahaan dan pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolah Pendapatna Daerah (BPPD)

B. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha yaitu:

1. Menyiapkan bahan dan melakukan penyusun rencana teknis operasional
2. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan teknis operasional
3. Evaluasi dan pelaporan terutama pada bidang ketatausahaan

C. Kepala Seksi Retribusi, Pendapatan lain dan Penagihan

Tugas dari Kepala Seksi Retribusi, Pendapatan lain dan Penagihan yaitu:

1. Menyiapkan dan menyusun rencana teknis operasional
2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang retribusi, pendapatan lain dan penagihan

D. Kepala Seksi PKB dan BBNKB

Tugas dari Kepala Seksi PKB dan BBNKB yaitu:

1. Menyiapkan, menyusun rencana teknis operasional
2. Koordinasi dan pelaksana teknis operasional
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor

Aktivitas Pelaksanaan Magang

Saat pelaksanaan kegiatan magang penulis melaksanakan kegiatan magang di Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) Pemasang. Penulis mulai melakukan kegiatan magang pada hari Rabu, 2 Maret 2022 sampai dengan hari Jumat 27 Mei 2022 dalam jangka waktu tiga bulan lamanya. Selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan penulis ditempatkan bagian Retribusi Pendapatan Lain dan Penagihan. Jam kerja yang ditetapkan oleh Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pemalang yakni, senin sampai kamis dimulai pukul 07.00 s.d 15.30 WIB sedangkan hari jumat dimulai pukul 07.00 s.d 14.00 WIB.

Beberapa hal yang dapat dipelajari mengenai alur penagihan untuk piutang pada Pajak Kendaraan Bermotor dalam kegiatan *door to door* adalah:

1. Melakukan kegiatan mencetak SPKPPKB
2. Input atau rekam data SPKPPKB
3. Menjurnal SPKPPKB
4. Mengarsip SPKPPKB
5. Menjurnal Tunggakan PKB

Berikut ini adalah penjelasan dari penulis tentang pekerjaan apa saja yang dilakukan selama melaksanakan kegiatan magang atau Praktik Kerja Lapangan di UPPD pemalang antara lain:

Melakukan kegiatan mencetak SPKPPKB

Kegiatan menulis mencetak SPKPPKB (Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor) setiap bulan secara rutin. Kabupaten Pemalang memiliki 14 kecamatan namun kegiatan *door to door* hanya dilakukan di enam kecamatan saja yaitu kecamatan Pemalang, kecamatan Taman, kecamatan Petarukan, kecamatan Comal, kecamatan Ulujami, kecamatan Ampelgading. Untuk mencetak data SPKPPKB harus masuk terlebih dahulu ke Aplikasi Pengiriman SPKPPKB. Untuk dapat masuk ke aplikasi penulis menggunakan akun admin Unit Pengelolaan Pendaptan Daerah Pemalang.

Lalu setelah masuk ke aplikasi, penulis membuka SP-KPPKB 1 dan klik cetak. Selanjutnya pilih kecamatan yang ingin di cetak, tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 1 sampai tanggal 31 atau tanggal yang diinginkan dan pilih bulan yang diinginkan, menentukan minimal pokok PKB, untuk roda dua dengan miniman PKB sebesar Rp 200.000 dan roda empat sebesar Rp 500.000, pilih status belum cetak, pilih tampilkan. Selanjutnya akan muncul nomor polisi yang mengalami tunggakan, pilih semua nomor polisi yang tertera dan pilih cetak.

Kemudian setelah semua surat telah di cetak semua maka surat di beri stempel kepala UPPD Pemalang. Setelah itu surat siap di berikan kepada rekanan UPPD yaitu PT Kilau Jaya Mandiri sebagai pihak ketiga yang menemui wajib

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pajak secara langsung di tempat tinggal wajib pajak dan sebagian surat diberikan kepada pegawai untuk menemui langsung wajib pajak di tempat tinggal wajib pajak.

Input atau rekam data SPKPPKB

SPKPPKB kegiatan *door to door* di bagi menjadi dua yaitu untuk rekanan dan pegawai. Perbedaan antara SPKPPKB kegiatan *door to door* rekanan dan SPKPPKB kegiatan *door to door* pegawai yaitu pada SPKPPKB rekanan terdapat stempel UPPD Pemalang dan PT Kilau Jaya Mandiri sebagai rekanan atau pihak ketiga, sedangkan SPKPPKB pegawai hanya terdapat stempel UPPD Pemalang saja. Sebelum memulai merekap penulis SPKPPKB kegiatan *door to door* penulis menghitung jumlah setoran SPKPPKB lalu pembagian SPKPPKB untuk rekanan dan pegawai. Untuk merekam SPKPPKB penulis membuka aplikasi Pengiriman SPKPPKB terlebih dahulu dengan menggunakan akun rekanan atau akun pegawai, sesuai dengan data SPKPPKB yang ingin di input atau rekam.

Ketika sudah masuk akun maka klik bagian SP-KPPKB 1 pilih rekam status. Selanjutnya masukkan nomor polisi lalu klik *enter* akan muncul nama pemilik kendaraan dan dan alamat wajib pajak lalu masukkan status sesuai dengan SPKPPKB. Terdapat delapan pilihan status kendaraan,yaitu:

1. Dimiliki, wajib pajak memberikan no telpon dan menandatangani surat
2. Dijual, pihak SAMSAT memberi formulir terkait kendaraan tersebut
3. Rusak berat, wajib pajak harus memberikan surat keterangan dari bengkel
4. Hilang, wajib pajak harus menunjukkan surat kehilangan dari kantor polisi
5. Meninggal dunia, menunjukkan surat ahli waris
6. Menutup usaha / parilit, menunjukkan surat keterangan pailit
7. Dicabut registasinya
8. Tidak diketahui alamat dikarenakan adanya beralih kepemilikan dan atau sebab lain, petugas harus melengkapi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

keterangan dari RT atau RW dan stempel dari kecamatan yang bersangkutan.

Pilih salah satu dari delapan status yang ada pada SPKPPKB sesuai dengan data yang ingin di input. Kemudian masukkan nomor telpon wajib pajak, terutama untuk wajib pajak yang berstatus kendaraan dimiliki. Pastikan data yang ingin di rekap sudah benar dan sesuai dengan SPKPPKB kegiatan door to door. Selanjutnya klik simpan agar data yang direkam tersimpan.

Menjurnal SPKPPKB

Penulis terlebih dahulu membuka aplikasi Pengiriman SPKPPKB dengan menggunakan akun rekanan untuk SPKPPKB rekanan dan akun pegawai untuk SPKPPKB pegawai. Kemudian pilih pelaporan dan klik jurnal. Pastikan jumlah SPKPPKB sesuai dengan data SPKPPKB yang direkam. Selanjutnya klik Excel, data yang sudah di rekap pindah dalam bentuk MS Excel. Kemudian buka data MS Excel yang berisi data rekaman yang telah di unduh, lalu beri nomor SPKPPKB sesuai nomor urut yang berada pada data MS Excel. Menjurnal ini dilakukan agar semua data yang telah di input sesuai dengan bukti dokumen fisik yang harus dicatat sebagai bukti data transaksi yang akurat.

Mengarsip SPKPPKB

Setelah melakukan penjurnalan SPKPPKB hal yang di lakukan berikutnya adalah mengarsip SPKPPKB. Pengarsipan SPKPPKB dalam bentuk fisik di buat dalam bentuk klipng. Hal ini dilakukan agar arsip bisa terpeliharaan dengan baik, teratur dan aman. Jika dibutuhkan dapat ditemukan dengan cepat dan tepat.

Menjurnal Tunggakan PKB

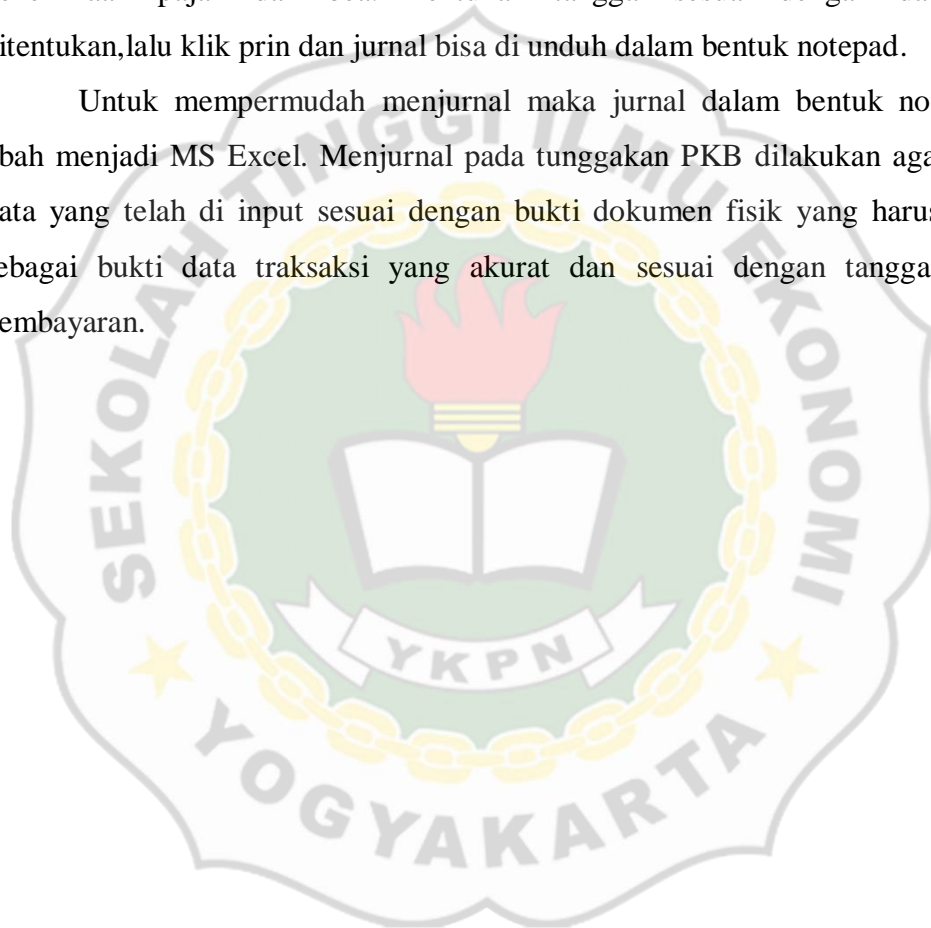
Tunggakan adalah piutang untuk wajib pajak. Tunggakan PKB tidak semua berasal dari kegiatan *door to door*, melainkan dari kesadaran wajib pajak sendiri yang sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Tunggakan dapat dibayar melalui beberapa fasilitas yang di berikan oleh Samsat Pemalang untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak. Pembayaran PKB dapat dilakukan menggunakan fasilitas yang diberikan berupa Samsat Cepat yang berada di kantor Samsat Pemalang, Samsat keliling menggunakan bis, hiace, dan APV dan aplikasi sakpole untuk Samsat online. Data tunggakan dapat diperoleh

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dari aplikasi Samsat Jawa Tengah Online. Aplikasi dapat dibuka dengan akun sppkbpml1.

Setelah aplikasi terbuka langkah pertama pilih jenis transaksi lokal. Lalu pilih data tunggakan pembayaran PKB yang di inginkan. Selanjutnya pilih jurnal penerimaan pajak dan bea. Tentukan tanggal sesuai dengan data yang ditentukan, lalu klik prin dan jurnal bisa di unduh dalam bentuk notepad.

Untuk mempermudah menjurnal maka jurnal dalam bentuk notepad di ubah menjadi MS Excel. Menjurnal pada tunggakan PKB dilakukan agar semua data yang telah di input sesuai dengan bukti dokumen fisik yang harus dicatat sebagai bukti data transaksi yang akurat dan sesuai dengan tanggal terjadi pembayaran.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS

Teknologi Informasi

Teknologi adalah pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan untuk mencapai tujuan praktis. Teknologi ialah teknik serta proses yang hasilnya diperoleh dari memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai agar bisa memenuhi kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Gordon B Davis menjelaskan bahwa informasi adalah suatu data yang telah diolah menjadi bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai asli atau nilai yang dapat dirasakan dalam keputusan untuk sekarang maupun yang akan datang (Andri, 2020)

Anshori, S menjelaskan bahwa teknologi informasi ialah sebuah sistem teknologi yang dapat menghubungkan langsung dengan pengguna komputernya, sehingga pengguna bisa dengan mudah memanfaatkan untuk mengakses informasi dan mengendalikan alat-alat yang berada sekitarnya. Adanya sebuah perangkat komputer dan jaringan-jaringan pendukung lainnya, sangat diharapkan teknologi informasi ini dapat membantu dan memberikan sebuah informasi yang baik dan layak yang sesuai yang dibutuhkan oleh kelompok maupun individu.

Perpajakan

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga kestabilan suatu negara agar semua yang ada di dalamnya dapat berfungsi dengan baik dan benar. Pajak adalah keharusan masyarakat membayar kepada negara yang bersifat memaksa dan secara tidak langsung masyarakat akan mendapatkan imbalan yang diterima secara pribadi dari negara, serta dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum seperti membangun fasilitas bagi masyarakat.

Pajak Daerah

Berdasarkan KUP Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah ini yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Pajak adalah kontribusi masyarakat yang bersifat wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak memperoleh imbalan secara

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan KUP Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri dari:

1. Pajak Provinsi memiliki lima kewenangan untuk mengelolah pajak provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Adapun Pajak Kota/Kabupaten memiliki sebelas kewenangan yang di berikan untuk mengelolah Pajak Kota/Kabupaten terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan bagian dalam jenis pajak provinsi yakni bagian dari Pajak Daerah. Penjelasan Pajak Kendaraan Bemotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Sedangkan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan yang beroda beserta gandengannya yang dapat digunakan di semua jenis jalan dan dapat gerakkan dengan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, sehingga dapat memberikan energi gerak pada suatu kendaraan.

Objek Pajak

Objek Pajak Kendaraan Bemotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk kendaraan bemotor beroda beserta gandengannya, yang berioperasi di semua jenis jalan darat dan jenis kendaraan bermotor yang beroperasi di air.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Subjek Pajak

Subjek untuk kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

Dasar Pengenaan PKB

Berdasarkan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan perkalian dari dua unsur pokok:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan kendaraan air dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Untuk menentukan harga umum pasaran adalah harga yang diperoleh dari beberapa sumber data, antara lain, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan asosiasi penjual kendaraan bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan seluruh atau sebagian faktor-faktor:

- a. isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama.
- b. Penggunaan kendaraan
- c. Jenis kendaraan bermotor
- d. Merek kendaraan bermotor
- e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor
- f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan
- g. Dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB) kendaraan bermotor .

2. Bobot

Pada bobot kendaraan bermotor dapat menunjukkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat dari penggunaan kendaraan bermotor. Ada pun beberapa faktor yang dapat dihitung untuk Bobot kendaraan yaitu:

- 1) Tekanan gandar
- 2) Jenis bahan bakar yang digunakan pada kendaraan bermotor

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor

3.4.4 Tarif Pajak

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku di setiap Provinsi untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor. Sesuai dengan jenis kepemilikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor di bagi menjadi tiga bagian:

1. 1,2% menunjukkan kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi
2. 2% menunjukkan kepemilikan untuk kendaraan bermotor oleh badan
3. 0,5% menunjukkan bagi kendaraan ambulan, angkutan umum, pemadam kebakaran, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. 0,2% menunjukan untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

3.4.5 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PKB

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor harus dapat dibayar lunas sekaligus untuk masa waktu 12. Jika ada wajib pajak yang terlambat akibat lupa atau hal lain maka dalam membayar pajak maka akan mendapatkan sanksi administrasi, yaitu:

1. Wajib pajak terlambatan membayaran akibat melebihi jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi yang berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak itu sendiri.
2. Keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan yang perhitungannya dari pajak yang terlambat dibayar atau kurang bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan atau 2 tahun terhitung sejak terhutangnya pajak.

Apabila pajak tidak dibayar lunas setelah jatuh tempo maka akan ada petugas yang ditunjuk gubernur guna melaksanakan tindakan penagihan pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tunggakan Pajak dan Tindakan Penagihan Pajak

Tunggakan Pajak

Bisa terjadinya tunggakan pajak akibat dari lalainya wajib pajak dalam membayar pajak. Besarnya nominal pajak terutang yang belum dibayar oleh wajib pajak merupakan penjelasan dari tunggakan pajak. Tunggakan pajak disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Adanya kegiatan pemeriksaan
2. Wajib pajak yang tidak mampu untuk membayar kewajiban

Tindakan penagihan pajak

Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2000, pengertian dari penagihan pajak adalah serangkaian perilaku agar penanggung pajak mau melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, yaitu langkah pertama dengan memberi tegur atau memperingatkan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Ada dua tindakan pengihan pajak yaitu pasif dan aktif. Tindakan penagihan pasif yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Jika ada wajib pajak dalam jangka waktu 30 hari belum bisa melakukan pelunasan, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan dilakukan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. Pajak aktif mengirim sebuah surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan adanya tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan lelang.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN SOLUSI

Permasalahan yang terjadi

Selama melakukan kegiatan magang ada beberapa masalah dan isu-isu yang dialami penulis selama kurang lebih 3 bulan dalam melaksanakan kegiatan magang di UPPD Pematang. Masalah pertama, penulis tidak mengenal dengan jenis printer yang digunakan untuk mencetak SPKPPKB sehingga sering terjadi gangguan teknis pada printer. Contoh gangguan teknis adalah kertas printer tersangkut dan dobel cetak SPKPPKB.

Masalah kedua, pada saat penulis melakukan input atau merekam data sering menemukan nomor polisi yang tidak bisa di input. Padahal SPKPPKB sudah dicetak dan juga sudah melakukan kegiatan *door to door* untuk mengetahui status kendaraan wajib pajak. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan nomor polisi wajib pajak sudah ganti atau karena mutasi.

Masalah ketiga, saat melakukan rekam data SPKPPKB dalam kegiatan *door to door* penulis sering menemukan kesalahan yang dilakukan oleh rekanan. Contohnya tidak menulis nomer telpon wajib pajak yang berstatus kendaraan dimiliki, tidak memberikan stempel kecamatan untuk wajib pajak yang berstatus kendaraan tidak diketahui dan telat menyetoran SPKPPKB.

Masalah terakhir tidak lengkapnya bukti surat pembayaran tunggakan PKB pada saat menjurnal PKB SAMSAT lokal. Hal ini bisa saja terjadi karena telatnya pegawai dalam menyetorkan surat unggakan PKB.

Solusi Permasalahan

Untuk mengatasi masalah gangguan teknis pada printer yaitu dobel cetak. Solusi yang dilakukan penulis ialah melakukan pencatatan terkait dengan SPKPPKB yang ingin di cetak. Adanya pencatatan yang dilakukan akan mengurangi terjadinya dobel cetak pada kertas SPKPPKB. Selain itu tidak terburu-buru dalam mencetak SPKPPKB sehingga tidak terjadi printer macet akibat adanya kertas yang menyangkut.

Permasalahan yang sering ditemukan terjadi saat melakukan input atau merekam data adalah adanya nomor polisi yang tidak dapat di input. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan wajib pajak yang mengganti nomor polisi misalnya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

karena wajib pajak kendaraan di blokir, mutasi atau melakukan bea balik nama. Untuk mengatasi masalah ini penulis di arahkan untuk membuka aplikasi e-SAMSAT agar dapat memperoleh data terbaru terkait wajib pajak yang bersangkutan.

Permasalahan yang dilakukan rekanan sebagai contoh, tidak menulis nomer telpon wajib pajak yang berstatus kendaraan dimiliki, tidak memberikan stempel kecamatan untuk wajib pajak yang berstatus kendaraan tidak diketahui. Solusi yang diberikan untuk wajib pajak yang tidak memberikan nomor telpon ialah memberi no telpon Kasi Retribusi, Pendapatan lain dan Penagihan. Apabila terjadi banyak kesalahan untuk SPKPPKB yang berstatus tidak diketahui dan sebab lain maka SPKPPKB dikembalikan kepada rekanan untuk meminta stempel kecamatan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar SPKPPKB dapat diakui sehingga data dan status wajib pajak bisa di input. Permasalahan rekanan selanjutnya adalah telat menyetorkan SPKPPKB. hal ini bisa saja terjadi karena rekanan telat menyetorkan SPKPPKB misal, cetak SPKPPKB bulan Maret maka rekanan harus setor di tanggal awal bulan April namun pada saat itu rekanan setor dua bulan setelah SPKPPKB dicetak. Dampak dari ini yaitu pada saat menginput atau merekam SPKPPKB hasil data tidak muncul namun pada saat jurnal di *download* data akan muncul. Hal ini terjadi karena wajib pajak sudah membayar tunggakan pajak sebelum data SPKPPKB di input yang mengakibatkan data wajib pajak tidak dapat terbaca pada saat di input.

Permasalahan dalam menjurnal tunggakan PKB pada SAMSAT lokal adalah tidak lengkapnya bukti surat pembayaran tunggakan PKB. SAMSAT lokal terdiri dari SAMSAT Cepat, SAMSAT Keliling dengan menggunakan kendaraan bis, APV dan hiace dan SAMSAT Malam. Untuk mengatasi masalah tidak lengkapnya bukti surat pembayaran tunggakan PKB, penulis melakukan pencatatan terkait dengan bukti surat pembayaran tunggakan PKB yang tidak lengkap dan melakukan penagihan kepada pegawai yang bekerja pada bagian pelayanan di SAMSAT Cepat, SAMSAT Keliling, dan SAMSAT Malam.

Agar data pada aplikasi ter *upgrade* dengan baik maka pada saat membayar pajak kendaraan motor tahunan untuk mengkonfirmasi kepada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

wajib terkait data wajib pajak. Sehingga jika ada wajib pajak yang sudah pindah alamat atau domisi dan ganti kepemilikan kendaraan akan dengan cepat petugas mengganti data tersebut. Selain itu diharapkan dengan kegiatan *door to door* dapat berjalan dengan baik, lancar dan semestinya. Tidak hanya sebagai usaha menagih wajib pajak dan mengetahui status kendaraan namun juga menjadi suatu kegiatan yang dapat berlajani dengan efektif dan efisien.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KESIMPULAN, REKOMENDARI DAN REFLEKSI DIRI

Kesimpulan

Penulis telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di STIE YKPN adalah Pelaksanaan magang dan membuat laporan magang. Dari kegiatan magang yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan beberapa hal:

- a. Penting adanya kegiatan edukasi pembelajaran tentang Pajak Kendaraan Bermotor dimana hal ini dapat membantu wajib pajak agar dapat mengetahui hak dan kewajiban membayar sehingga, pajak yang dibayar dapat digunakan untuk pembangunan jalan atau meningkatkan transportasi umum.
- b. Dengan adanya kegiatan *door to door* dalam menangani tunggakan PKB jumlah tunggakan yang sebelumnya tinggi sedikit demi sedikit dapat teratasi dari jumlah tunggakan sebelumnya.

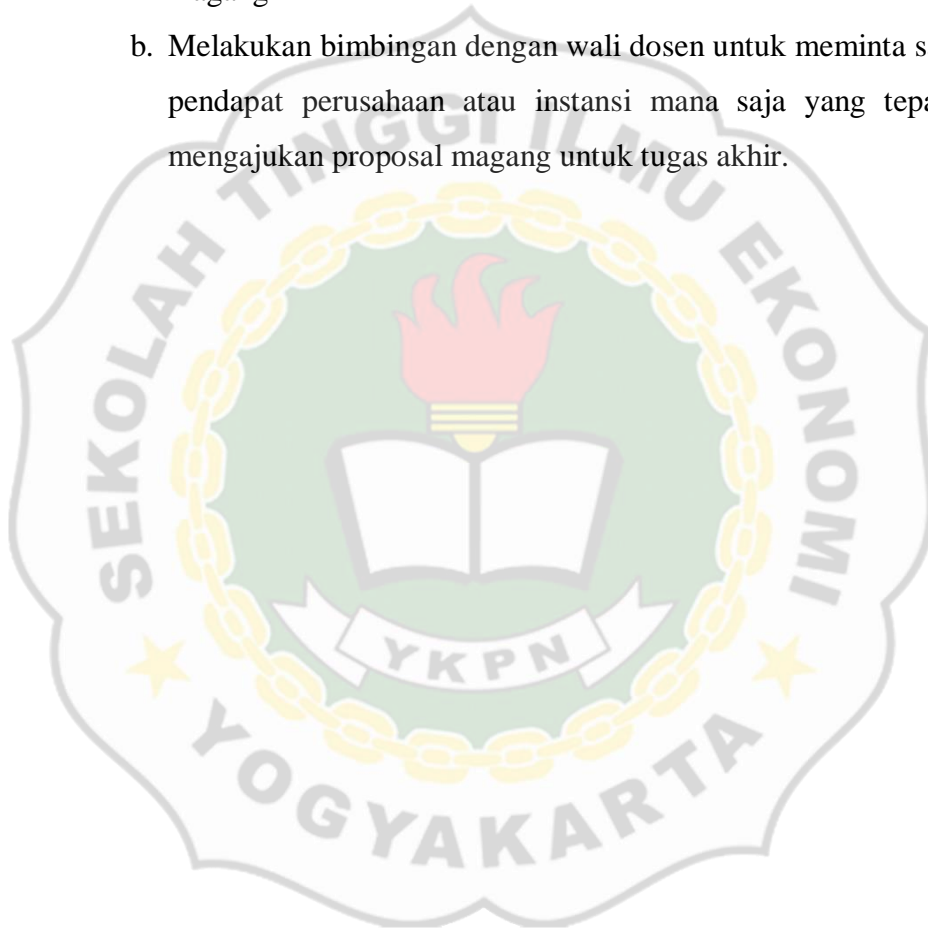
c. Rekomendasi

1. Bagi Instansi
 - a. Dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi Pajak Kendaraan Bermotor agar wajib pajak dapat membayar tepat waktu dan juga dapat mengetahui haknya.
 - b. Adanya peningkatan kegiatan *door to door* secara menyeluruh di semua kecamatan yang ada di kabupaten Pemalang.
2. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Alangkah lebih baik jika dosen pembimbing magang dari pihak perguruan tinggi melakukan komunikasi dengan pembimbing magang yang berada di instansi sehingga dapat menjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah supaya dapat memudahkan mahasiswa pada saat akan melakukan kegiatan magang di instansi.
 - b. Memberikan pengarahan dan pembekalan tentang moral dan etika kerja kepada mahasiswa sehingga pada saat melakukan magang dapat membawa nama perguruan tinggi dengan baik.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa yang tertarik untuk melakukan kegiatan magang sebaiknya satu semester sebelumnya sudah mencari informasi mengenai perusahaan atau instansi yang membuka lowongan magang
- b. Melakukan bimbingan dengan wali dosen untuk meminta saran dan pendapat perusahaan atau instansi mana saja yang tepat untuk mengajukan proposal magang untuk tugas akhir.



DAFTAR PUSTAKA

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Abdullah, M. K. (2020). Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Kendari. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 205-217.
- Andri, U. (2020). *Pengenalan Teknologi Informasi*. PUSDIKLAT BPS RI.
- Anshori, S. (2018). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 90-100.
- dppad.jatengprov.go.id. (2013, November 4). *UPPD Pemalang*. Retrieved Mei 22, 2022, from BPPD Jawa Tengah: <http://dppad.jatengprov.go.id/up3ad-kab-pemalang/>
- Khoiriyah, N. P. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur di Unit Pelaksana Teknik Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Narulita, R. S. (2016). Tinjauan Kegiatan Door To Door Terhadap Pembayaran Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syukur, R. (2019). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Yang Berdampak Pada Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Kantor Pemerintahan Desa yang Terdapat di Kabupaten Majalengka). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.

Perundang- Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan